

## **Urgensi Administrasi Kependudukan Desa Lau Tawar Kabupaten Dairi Perspektif UU No. 23 Tahun 2006**

Isnawati Sembiring

Isnawatisembiring00@gmail.com

Zulfan Efendi Hasibuan

zulfanefendihasibuan@gmail.com

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

### **Abstract**

*This study examines the role of the Lau Tawar Village government in increasing public awareness so that population administration is orderly because if you see there are still many Lau Tawar Village people who are less concerned about their population administration. The type of research used by researchers in this study is field research and the approach used is a sociological juridical approach. Data collection techniques used in this study consisted of interviews, observation, and documentation. The data analysis technique by researchers of this research is descriptive analysis, which is a study that describes, writes, and explains a situation and symptom, that occurs in the field. The result of this research is that the government of Lau Tawar Village acts as a regulator, namely issuing an appeal to the community. As a dynamist who comes directly to the house, and as a facilitator by providing a wifi network, printers and laptops. The factors that support the orderly community of population administration are the availability of wifi at the village office and a mini library where people can store data. Inhibiting factors are human resources that are still lacking, lack of discipline in the village apparatus, low public awareness, and inadequate facilities.*

*Keywords: Administrative Urgency, Role of Government, Population Administration*

### **Abstrak**

*Penelitian ini meneliti tentang peran pemerintah Desa Lau Tawar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib administrasi kependudukan karena jika dilihat masih banyak masyarakat Desa Lau Tawar yang kurang peduli terhadap administrasi kependudukannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini ialah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang melukiskan, menggambarkan, memaparkan, menuliskan, dan menjelaskan suatu keadaan dan gejala, yang terjadi di lapangan. Hasil Dari penelitian ini ialah pemerintah*

*Desa Lau Tawar berperan sebagai regulator yaitu mengeluarkan himbauan kepada masyarakat. Sebagai dinamisator mendatangi langsung kerumah, dan sebagai fasilitator dengan menyediakan jaringan wifi, Printer dan Laptop. Faktor pendukung masyarakat tertib administrasi kependudukan yaitu sudah tersedianya wifi di kantor Desa dan perpustakaan mini tempat untuk menyimpan data masyarakat. Faktor Penghambat sumber daya manusia yang masih kurang, Kedisiplinan aparat desa yang kurang, kesadaran masyarakat yang rendah, dan fasilitas yang kurang memadai.*

*Kata Kunci : Urgensi Administrasi, Peran Pemerintah, Administrasi Kependudukan*

## **A. Pendahuluan**

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan terwujudnya tertib administrasi kependudukan akan mensejahterakan seluruh masyarakat karena pada dasarnya tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat

bukan individu-individu.<sup>1</sup> Peristiwa kependudukan antara lain: perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau sementara, serta perubahan orang Asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting lainnya antara lain: akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama, serta peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang yang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan.

---

<sup>1</sup>Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol.4, No. 1 (2018), hlm.106 .

Di dalam undang-undang Republik Indonesia Tentang Administrasi kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 dijelaskan bahwa “pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia”.<sup>2</sup> Bahwa segala aspek kehidupan masyarakat harus diatur berdasarkan hukum. Salah satu peraturan hukum yang dikeluarkan yaitu peraturan Administrasi kependudukan.<sup>3</sup>

Dengan *research* yang dilakukan peneliti dengan Bapak Benni Tarigan selaku sekretaris desa Lau Tawar menyebutkan sekitar 1.300 jiwa penduduk pada

tahun 2020 sebanyak 50 orang yang tidak memiliki KTP, 45 orang yang tidak memiliki kartu keluarga, 25 orang yang tidak memiliki Akta Lahir dan 30 orang yang tidak memiliki surat pindah. Kemudian pada tahun 2021 sekitar 1.376 jiwa penduduk sekitar 150 orang yang tidak tertib administrasi di totalkan dengan semua kegiatan administrasi kependudukan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari kepala Desa, sekretaris Desa, perangkat Desa, dan masyarakat Desa Lau Tawar. Data Sekunder yang digunakan yaitu dengan melakukan kajian buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu

---

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Tentang Administrasi kependudukan Nomor 23 Tahun 2006.

<sup>3</sup>Zul Anwar Ajim Harahap, “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Ke syariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No.1, (2018), hlm.16.

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan melakukan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung mengharuskan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden.<sup>4</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, memaparkan, menuliskan, atau menjelaskan suatu keadaan, gejala yang terjadi di lapangan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah Urgensi Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan pencatatan sipil Desa Lau Tawar Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi provinsi Sumatera Utara.

### **C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian**

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah

---

<sup>4</sup>Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," *Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5.2 (2019), hlm. 232.

Desa tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa saja, tetapi Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat juga menyelenggarakan urusan pemerintah di atasnya terkait dengan Desa.

Pemerintah Desa sebagai pemimpin harus mampu menertibkan masyarakatnya untuk tertib administrasi kependudukan agar tercapainya tujuan dari pemerintahan yaitu mensejahterakan rakyat. Dengan adanya peran pemerintah desa maka dapat meningkatkan pembangunan di Desa Tersebut juga akan mempengaruhi pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dalam wadah kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Hendra Gunawan, 'Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional', *Yurisprudencia:*

Pada Hakikatnya adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada setiap orang yang hak-hak melekat padanya.<sup>6</sup>

Tertib Administrasi kependudukan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi masalahnya masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Pemerintah selalu menggunakan caranya sendiri dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di tanah nusantara ini, termasuk dengan memperkuat hukum dan regulasi peraturan yang *absolut*.<sup>7</sup>

Dalam Hal ini manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengemban amanat yang diturunkan Allah untuk mengatur dan memanfaatkan semua potensi

yang ada di dunia, dan inilah yang menjadi pembeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya.<sup>8</sup> Walaupun kita ketahui bahwa peraturan bukan dibuat oleh pemerintah desa tetapi setidaknya pemerintah Desa dapat memberikan pengetahuan atau edukasi mengenai syarat-syarat apa saja yang diperlukan pada saat mengurus

administrasi kependudukan sehingga tertib administrasi kependudukan dapat terealisasi dengan baik. Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang penting dalam administrasi kependudukan, karena dengan pelayanan yang cepat akan memuaskan masyarakat dan akan membuat masyarakat senang dalam mengurus administrasi kependudukan.

Desa Lau Tawar sendiri masih kurang cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal inilah salah satu

---

*Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 118.

<sup>6</sup>Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 (Ditinjau dari asas keadilan", Vol. 7, No. 1 (2019), hlm. 5.

<sup>7</sup>Mustafid Ahmad Iffan, "Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial ....," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No.1, (2021), hlm. 95.

---

<sup>8</sup>Muhammad Idris dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL-FAWATI: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis Vol .1, No.1*, (2020), hlm. 9.

penyebab masyarakat malas dalam mengurus administrasi kependudukannya. Segala keluhan masyarakat tidak dikoordinir oleh pemerintah desa.

Profesionalitas Dalam Pelayanan, Profesionalitas merupakan peranan yang penting dalam tercapainya suatu pelayanan yang berkualitas. Profesionalitas berarti menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Profesionalitas disini bukan hanya terkait dengan pekerjaan tetapi juga terkait dengan masalah kedisiplinan

Desa Lau Tawar merupakan salah satu Desa yang terletak di Sumatera Utara Kabupaten Dairi kecamatan Tanah Pinem, dimana masih banyak terdapat masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan karena kesadaran masyarakat yang rendah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya harus adanya peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan.

Pada peraturan Daerah Kabupaten Dairi No 8 Tahun 2009 pada pasal 4 huruf e disebutkan "Penugasan kepala Desa/lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan".

Untuk menertibkan administrasi kependudukan tentunya tidak hanya perangkat desa melainkan juga kepala desa bekerja sama dengan masyarakat dan juga dinas kependudukan dan catatan sipil.

Dengan mengutamakan asas permusyawaratan dan perwakilan yaitu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.<sup>9</sup>

Pemerintah Desa berperan penting dalam melayani masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Untuk

---

<sup>9</sup> Fatahuddin Aziz Siregar, "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya," *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol. 4. No. 2 (2018), hlm. 6.

melayani kebutuhan masyarakat peran pemerintah desa sangat dibutuhkan guna mewujudkan masyarakat yang berkembang dan sejahtera.

Dalam Hal ini pemerintah daerah berperan untuk membantu menyelesaikan segala proses administrasi masyarakat sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, membantu masyarakat agar nantinya tidak terjadi kesalahan identitas dan kemudian masyarakat dapat di akui keberadaannya di dalam negara. Peran pemerintah desa dalam tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam Islam mengenai administrasi terdapat pada fiqh siyasah yaitu siyasah idariyah. Siyasah idariyah berkaitan dengan administrasi negara. Kata idariyah sendiri berarti mengatur dan menjelaskan sesuatu. Terdapat 3 aspek agar dapat mewujudkan sistem administrasi yang baik menurut siyasah idariyah yaitu:

Sederhana Dalam Peraturan, Peraturan yang sederhana akan memudahkan pelaksana peraturan dalam tertib administrasi kependudukan, kemudahan dalam syarat- syarat apa saja yang dibutuhkan dalam proses administrasi merupakan hal yang penting.

Hasil Penelitian dalam penelitian ini yaitu pemerintah Desa berperan sebagai regulator (pemberi kebijakan), sebagai dinamisator (penggerak), dan sebagai fasilitator (memfasilitasi).

*Pertama* Pemerintah Sebagai Regulator (kebijakan) yaitu pemerintah menerbitkan peraturan- peraturan untuk menunjang eektivitas tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Lau Tawar beliau mengatakan “dalam hal ini salah satu yang di buat pemerintah Desa Lau Tawar ialah telah membuat himbauan kepada masyarakat agar

mereka mengurus administrasi kependudukannya.<sup>10</sup>

*Kedua*, pemerintah sebagai Dinamisator yaitu sebagai penggerak semua unsur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan. Pemerintah Desa Lau Tawar dalam hal ini melakukan beberapa tindakan yaitu Pembinaan Kemasyarakatan Desa kepala Desa memiliki tugas sebagai pembinaan kemasyarakatan desa pembinaan yang di lakukan dapat berupa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban masyarakat.

*Ketiga* Pemerintah Sebagai Fasilitator, dalam Hal ini peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menjembatani kepentingan-kepentingan pihak sebagai pelaku peningkatan dalam bidang administrasi kependudukan. Dalam hal ini sebagai fasilitator pemerintah desa lau Tawar menyediakan laptop dan printer di kantor desa dan menyediakan wifi

untuk mempercepat dalam pengiriman berkas masyarakat.

Faktor pendukung dan faktor penghambat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil di Desa Lau Tawar.

Faktor pendukung yaitu tersedianya akses internet yaitu tersedianya wifi di kantor Desa, dengan adanya akses internet yang cepat memudahkan perangkat Desa untuk mengirim data masyarakat ke pusat. Adanya perpustakaan Desa di Kantor Desa, dengan adanya perpustakaan Desa ini dapat meningkatkan minat baca bagi masyarakat Desa, kemudian juga dapat digunakan untuk menyimpan berkas-berkas Desa agar tersusun rapi.

Faktor penghambatnya yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih kurang yaitu masih terdapat perangkat Desa yang kurang paham terkait dengan penggunaan komputer. Keterbatasan Fasilitas, di Kantor Desa hanya terdapat satu laptop sehingga pada saat masyarakat ramai datang ke kantor desa

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Sekretaris Desa Lau Tawar Oleh Bapak Benni Tarigan Pada 23 April 2022 Pukul 10.00. WIB

mengharuskan masyarakat untuk menunggu. Kedisiplinan aparat Desa yang kurang masih terdapat perangkat desa yang datang terlambat. Wawancara yang dilakukan peneliti terkadang kepala Desa sendiri lah yang membuka kantor Desa berhubung yang bertugas belum hadir. Kesadaran masyarakat yang kurang, seperti yang kita ketahui bahwamasyarakat lebih memilih untuk ke kebun daripada mengurus administrasi kependudukannya. Pada saat perlu disitulah masyarakat sibuk untuk mengurus administrasi kependudukannya.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian adalah Peran Pemerintah Desa Lau Tawar dalam meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah Desa Lau Tawar berperan sebagai *Regulator* (pemberi kebijakan) yaitu mengeluarkan himbuan kepada masyarakat agar tertib administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar.

Kemudian berperan sebagai *dinamisator* yaitu melaksanakan strategi dengan cara mendatangi langsung kerumah-rumah masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya untuk mempercepat dalam pengurusan administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Kemudian sebagai *Fasilitator*, di Kantor Desa telah disediakan jaringan wifi, Printer dan Laptop di kantor untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Lau Tawar.

Faktor pendukung dan penghambat proses tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa Lau Tawar. Untuk Faktor pendukung agar masyarakat tertib administrasi kependudukan yaitu sudah tersedianya wifi di kantor Desa sehingga memudahkan dalam pengiriman berkas ke pusat dan juga sudah tersedianya perpustakaan mini tempat untuk menyimpan data-data Desa Lau

Tawar. Faktor Penghambat nya terdapat sumber daya manusianya yang masih kurang, Kedisiplinan aparatur desa yang kurang, kesadaran masyarakat yang rendah, dan fasilitas yang kurang memadai.

## Daftar Pustaka

### a. Sumber Jurnal

Ahmad Iffan, Mustafid. 2021. "Kajian Sosio Legal dalam Pemahaman Syariat Islam dan Hukum Sosial ...." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 7 (1).

Ajim Harahap, Zul Anwar. 2018. "Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim Di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4 (1).

Hendra Gunawan. 2018. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4 (1).

Idris Muhammad dan Desri Ari Enghariano. 2018. "Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an," *AL-*

*FAWATI: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 1 (1).

Kurniawan, Puji. 2018. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 4 (1).

Lubis Ihsan Helmi. 2019. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017 (Ditinjau dari asas keadilan." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 7 (1).

Sawaluddin Siregar. 2019. "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara." *Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 5 (2).

Siregar, Fatahuddin Aziz. 2018. "Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya." *Jurnal Al-Maqasid* 4.

### b. Sumber Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Tentang Administrasi kependudukan Nomor 23 Tahun 2006.

Sumber Wawancara

Wawancara Dengan Sekretaris Desa Lau Tawar Oleh Bapak Benni Tarigan Pada 23 April 2022 Pukul 10.00. WIB